



KATALOG : 4102.32

INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT JAWA BARAT 2010



Badan pusat statistik Provinsi Jawa Barat

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan	2
1.3 Konsep Definisi	3
1.3.1 Rumahtangga dan Anggota Rumahtangga	3
1.3.2 Pendidikan	4
1.3.3 Kesehatan	5
1.3.4 Fertilitas	5
1.3.5 Ketenagakerjaan	6
1.3.6 Konsumsi Pengeluaran Rumahtangga	8
1.3.7. Perumahan	9
BAB 2 KEPENDUDUKAN	11
BAB 3 PENDIDIKAN	20
BAB 4 KESEHATAN	30
BAB 5 KETENAGAKERJAAN	35
BAB 6 PERUMAHAN	40
BAB 7 PENGELUARAN RUMAHTANGGA	47
BAB 8 ASPEK SOSIAL EKONOMI	53
8.1. Pemanfaatan Teknologi Informasi	53
8.2. Pelayanan Kesehatan, Beras Miskin dan jaminan Sosial	57

DAFTAR TABEL

Tabel		Halaman
2.1	Luas Wilayah, Jumlah Penduduk, Kepadatan Penduduk dan Persentase Total Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2010	13
2.2	Jumlah Penduduk, Sex Ratio, Komposisi Umur dan Angka Ketergantungan di Jawa Barat Tahun 2008-2010	16
2.3	Penduduk Jawa Barat Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2010	17
2.4	Jumlah dan Persentase Penduduk 10 Tahun Ketas Menurut Status Perkawinan dan Jenis Kelamin Tahun 2010	19
3.1	Penduduk Usia Sekolah, Angka Partisipasi Sekolah (APS) dan Angka Buta Huruf di Jawa Barat Tahun 2010	24
4.1	Lama Balita Menyusui, Persentase Penoling Kelahiran Terakhir dan Pemberian Imunisasi menurut Jenis Kelamin di Jawa Barat Tahun 2009 dan 2010	32
5.1	Persentase Penduduk Usia 15 tahun Keatas menurut Jenis Kegiatan di Jawa Barat Tahun 2009 dan 2010	35
5.2	Persentase Penduduk Usia 15 tahun Ke atas Menurut Lapangan Pekerjaan Utama di Jawa Barat Tahun 2009 dan 2010	36
5.3	Persentase Penduduk Usia 15 tahun Ke atas Menurut Status Pekerjaan Utama di Jawa Barat Tahun 2009 dan 2010	38
6.1	Persentase Rumah tangga Menurut Beberapa Indikator Perumahan Menurut Tipe Daerah di Provinsi Jawa Barat Tahun 2010	41
6.2	Persentase Rumah tangga Menurut Beberapa Indikator Perumahan Menurut Tipe Daerah di Provinsi Jawa Barat Tahun 2010	42
7.1	Persentase Penduduk Menurut Golongan Per Kapita Sebulan di Provinsi Jawa Barat Tahun 2010	49
7.2	Rata-rata Pengeluaran Per Kapita Menurut Tipe Daerah dan Jenis Konsumsi di Provinsi Jawa Barat Tahun 2010	50
7.3	Distribusi Pengeluaran Per Kapita Sebulan	51
8.1	Persentase Rumah tangga Menurut Penguasaan Telepon Rumah dan <i>Hand Phone</i> (HP) di Jawa Barat Tahun 2010	54
8.2	Persentase Rumah tangga Menurut Penguasaan Komputer di Jawa Barat di Jawa Barat Tahun 2010	55
8.3	Persentase Penduduk 10 Tahun Keatas Menurut Penggunaan Internet di Jawa Barat Tahun 2010	57
8.4	Persentase Rumah tangga yang Mendapat Pelayanan Kesehatan Gratis Selama 6 Bulan yang lalu dan Jenis Kartu yang Digunakan Provinsi Jawa Barat tahun 2010	58

8.5	Persentase Rumah tangga yang Mendapat/Membeli Beras Miskin Selama 3 Bulan yang lalu di Provinsi Jawa Barat Tahun 2010	60
8.6	Persentase Rumah tangga yang Mempunyai Jaminan Pembiayaan/Asuransi Kesehatan untuk Keperluan Berobat Jalan/Berobat Inap di Provinsi Jawa Barat Tahun 2010	61

<http://jabar.bps.go.id>

DAFTAR GAMBAR

Tabel		Halaman
3.1	Pencapaian Angka Melek Huruf Penduduk 10 Tahun Ke atas di Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2010	23
3.2	Angka Partisipasi Sekolah (APS) Menurut Jenjang Pendidikan dan Jenis Kelamin di Provinsi Jawa Barat Tahun 2010	28
3.3	Persentase Penduduk Usia 10 Tahun Keatas Menurut Ijazah tertinggi yang Dimiliki di Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2010	29
5.1	Persentase Rumahtangga menurut Penggunaan Kartu untuk Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Gratis di Provinsi Jawa Barat Tahun 2010	59

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Provinsi Jawa Barat adalah provinsi yang menyokong ibukota negara Indonesia, maka Provinsi Jawa Barat merupakan provinsi yang merasakan langsung dari dampak positif maupun dampak negatif dari pembangunan yang dilakukan di DKI Jakarta. Dampak positif yang terasa adalah pembangunan infrastruktur berupa jalan raya (tol) yang sudah dilaksanakan dari DKI sampai ke Bandung. Sehingga hal ini memberikan dampak yang positif bagi kegiatan ekonomi di Provinsi Jawa Barat. Namun selain dampak positif, dampak negatif yang terasa semakin bertambah orang yang tergiur dengan gemerlapnya ibukota, maka semakin banyak permasalahan di DKI dirasakan juga oleh masyarakat Provinsi Jawa Barat, diantaranya banjir, sampah yang melimpah, serta kejahatan yang ditimbulkan oleh kemiskinan masyarakat kota.

Pembangunan yang dilakukan di Provinsi Jawa Barat tidak terlepas dari pembangunan yang berkelanjutan dari tahun sebelumnya. Hasil pembangunan tidak akan terlihat apabila tidak ada yang terus menerus memantaunya. Pemantauan pembangunan bisa dilakukan dengan cara melihat data.

Data hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) merupakan data BPS yang dilakukan rutin setiap tahun. Data ini sudah dimanfaatkan oleh pemerintah dan masyarakat secara luas.

Pemanfaatan data oleh pemerintah mulai dari merumuskan masalah perencanaan, pemantauan atau evaluasi kekurangan serta keberhasilan pembangunan sebagai bahan penyusunan kebijakan. Sedangkan pemanfaatan oleh masyarakat diantaranya oleh para ilmuwan atau para kalangan pendidikan dalam melakukan studi ilmiah atau sebagai data pendukungnya. Karena data Sosial Ekonomi ini merupakan data yang selalu dinanti oleh pemerintah dan masyarakat, maka BPS berusaha untuk menyediakannya dengan mutu, kelengkapan dan ketepatan waktu yang makin baik.

Series data ini bisa digunakan untuk mengetahui apakah pembangunan yang dilaksanakan secara berkesinambungan dapat semakin dirasakan manfaatnya oleh lapisan masyarakat terutama pembangunan yang berhubungan langsung dengan pemenuhan kebutuhan hidup manusia.

Data Sosial Ekonomi merupakan data-data yang menyangkut bidang pendidikan, kesehatan/gizi, perumahan/lingkungan hidup, ketenagakerjaan, kegiatan sosial budaya, konsumsi dan pengeluaran rumah tangga.

1.2 Tujuan

Secara umum tujuan penyusunan publikasi Indikator Kesejahteraan Rakyat Jawa Barat 2010 adalah:

- a. Tersedianya data pokok tentang kesejahteraan masyarakat pada tingkat kabupaten/kota.

- b. Tersedianya data tentang kesejahteraan rumah tangga, sosial budaya, pendidikan, dan data kependudukan yang dirinci berdasarkan golongan umur, jenis kelamin, ketenagakerjaan, fertilitas, pemakaian kontrasepsi, tingkat kematian bayi, pola konsumsi penduduk, kecukupan konsumsi gizi, dan distribusi pengeluaran.

1.3 Konsep dan Definisi

1.3.1. Rumahtangga dan Anggota Rumahtangga

Rumahtangga dalam hal ini dibedakan menjadi dua, yaitu rumahtangga biasa dan rumahtangga khusus.

- 1) **Rumahtangga biasa** adalah seorang atau sekelompok orang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan fisik/sensus, dan biasanya makan bersama dari satu dapur. Yang dimaksud dengan makan dari satu dapur adalah jika pengurusan kebutuhan sehari-harinya dikelola bersama menjadi satu.
- 2) **Rumahtangga khusus**, yaitu orang-orang yang tinggal di asrama, tangsi, panti asuhan, lembaga pemasyarakatan, rumah tahanan, dan sekelompok orang yang mondok dengan makan (indekos) dan berjumlah 10 orang atau lebih tidak dicakup dalam Susenas.

Anggota rumahtangga adalah semua orang yang biasanya bertempat tinggal di suatu rumahtangga, baik yang berada di rumah pada waktu pencacahan maupun sementara tidak ada. Anggota rumahtangga yang telah bepergian 6 bulan atau lebih, dan anggota

rumahtanega yang bepergian kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan pindah/akan meninggalkan rumah 6 bulan atau lebih, tidak dianggap sebagai anggota rumahtangga. Orang yang telah tinggal di suatu rumahtangga 6 bulan atau lebih atau yang telah tinggal di suatu rumahtangga kurang dari 6 bulan, tetapi berniat menetap di rumahtangga tersebut dianggap sebagai anggota rumahtangga.

Kepala rumahtangga adalah seseorang dari sekelompok anggota rumahtangga yang bertanggung jawab atas kebutuhan sehari-hari rumahtangga tersebut atau orang yang dianggap/ditunjuk sebagai kepala di dalam rumahtangga tersebut.

1.3.2. Pendidikan

Sekolah adalah sekolah formal mulai dari pendidikan dasar, menengah dan tinggi, termasuk pendidikan yang disamakan.

Tidak/belum pernah sekolah adalah mereka yang tidak atau belum pernah sekolah. Termasuk mereka yang tamat/belum tamat Taman Kanak-kanak yang tidak melanjutkan ke SD.

Masih bersekolah adalah mereka yang sedang mengikuti pendidikan di pendidikan dasar, menengah atau tinggi.

Tidak sekolah lagi adalah mereka yang, pernah mengikuti pendidikan dasar, menengah atau tinggi, tetapi pada saat pencacahan tidak sekolah lagi.

Jenjang pendidikan tertinggi yang pernah/sedang diduduki (ditamatkan) adalah jenjang., pendidikan yang pernah

diduduki (ditamatkan) oleh seseorang yang sudah tidak sekolah lagi atau sedang diduduki oleh seseorang yang masih sekolah.

Angka Melek Huruf (AMH) adalah proporsi seluruh penduduk berusia 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis huruf latin atau huruf lainnya.

Angka partisipasi sekolah adalah proporsi dari seluruh penduduk dari berbagai kelompok umur tertentu (7 – 12, 13 – 15, 16 – 18, dan 19 – 24) yang masih duduk di bangku sekolah.

1.3.3. Kesehatan

Sakit adalah menderita penyakit menahun (kronis) atau gangguan kesehatan yang menyebabkan aktifitas kerja terganggu. Walaupun seseorang mempunyai keluhan kesehatan (misalnya masuk angin atau pilek) tetapi bila tidak terganggu kegiatannya sehari-hari maka ia dianggap tidak sakit.

Imunisasi adalah memasukkan kuman penyakit yang sudah dimatikan kedalam tubuh anak balita dengan cara suntik atau minum dengan maksud agar terjadi kekebalan terhadap jenis penyakit tertentu pada tubuh.

1.3.4. Fertilitas

Anak lahir hidup adalah anak yang pada waktu dilahirkan menunjukkan tanda-tanda kehidupan walaupun mungkin hanya

beberapa saat saja seperti jantung berdenyut, bernapas, dan menangis. Anak yang pada waktu lahir tidak menunjukkan tanda-tanda kehidupan disebut lahir mati.

1.3.5. Ketenagakerjaan

Penduduk yang termasuk angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran.

Penduduk yang termasuk bukan angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang masih sekolah, mengurus rumah tangga atau melaksanakan kegiatan lainnya.

Bekerja adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan, paling sedikit 1 jam (tidak terputus) dalam seminggu yang lalu. Kegiatan tersebut termasuk pula kegiatan pekerja tak dibayar yang membantu dalam suatu usaha/kegiatan ekonomi.

Penganggur terbuka, terdiri dari :

- a. Mereka yang mencari pekerjaan.
- b. Mereka yang mempersiapkan usaha.
- c. Mereka yang tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan.

- d. Mereka yang sudah punya pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja.

(lihat pada “*An ILO Manual on Concepts and Methods*”)

Mencari pekerjaan adalah kegiatan seseorang yang tidak bekerja dan pada saat survei orang tersebut sedang mencari pekerjaan.

Mempersiapkan suatu usaha adalah suatu kegiatan yang dilakukan seseorang dalam rangka mempersiapkan suatu usaha/pekerjaan yang “baru”, yang bertujuan untuk memperoleh penghasilan/ keuntungan atas resiko sendiri, baik dengan atau tanpa mempekerjakan buruh/pekerja dibayar maupun tidak dibayar. Mempersiapkan yang dimaksud adalah apabila “**tindakannya nyata**”, seperti: mengumpulkan modal atau perlengkapan/alat, mencari lokasi/tempat, mengurus surat ijin usaha dan sebagainya, telah/ sedang dilakukan.

Setengah Penganggur (*underemployment*) adalah mereka yang bekerja di bawah jam kerja normal (kurang dari 35 jam seminggu). Setengah Penganggur terdiri dari:

- **Setengah Penganggur Terpaksa** adalah mereka yang bekerja di bawah jam kerja normal (kurang dari 35 jam seminggu), dan masih mencari pekerjaan atau masih bersedia menerima pekerjaan.
- **Setengah Penganggur Sukarela** adalah mereka yang bekerja di bawah jam kerja normal (kurang dari 35 jam seminggu), tetapi

tidak mencari pekerjaan atau tidak bersedia menerima pekerjaan lain (sebagian pihak menyebutkan sebagai pekerja paruh waktu/*part time worker*).

Jumlah jam kerja seluruh pekerjaan adalah jumlah jam kerja yang dilakukan oleh seseorang (tidak termasuk jam kerja istirahat resmi dan jam kerja yang digunakan untuk hal-hal di luar pekerjaan) selama seminggu yang lalu.

Status pekerjaan adalah kedudukan seseorang dalam melakukan pekerjaan di suatu unit usaha/kegiatan. Mulai tahun 2001 status pekerjaan dibedakan menjadi 7 kategori yaitu : berusaha sendiri, berusaha dibantu butuh tidak tetap/buruh tidak dibayar, berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar, buruh/karyawan/pegawai, pekerja bebas di pertanian, pekerja bebas di non pertanian, dan pekerja tidak dibayar/pekerja keluarga.

1.3.6. Konsumsi Pengeluaran Rumahtangga

Pengeluaran rata-rata per kapita sebulan adalah rata-rata biaya yang dikeluarkan rumahtangga sebulan untuk konsumsi semua anggota rumahtangga dibagi dengan banyaknya anggota rumahtangga. Pengeluaran atau konsumsi rumah-tangga dibedakan menjadi dua yaitu konsumsi makanan dan bukan makanan tanpa memperhatikan asal barang dan terbatas pada pengeluaran untuk kebutuhan rumahtangga saja, tidak termasuk konsumsi pengeluaran untuk keperluan usaha rumahtangga atau yang diberikan kepada pihak lain. Pengeluaran untuk konsumsi makanan ditanyakan

selama seminggu yang lalu, sedangkan pengeluaran untuk bukan makanan setahun yang lalu. Baik konsumsi makanan maupun bukan makanan selanjutnya dikonversikan ke dalam pengeluaran rata-rata sebulan.

1.3.7. Perumahan

Luas lantai adalah luas lantai yang ditempati dan digunakan untuk keperluan sehari-hari. Bagian-bagian yang digunakan bukan untuk keperluan sehari-hari tidak dimasukkan dalam perhitungan luas lantai seperti lumbung padi, kandang ternak, jemuran, dan warung (sebatas atap).

Dinding adalah sisi luar/batas dari suatu bangunan atau penyekat dengan rumahtangga atau bangunan lain.

Atap adalah penutup bagian atas suatu bangunan sehingga orang yang mendiami di bawahnya terlindung dari teriknya matahari, hujan, dan sebagainya. Untuk bangunan bertingkat, atap yang dimaksud adalah bagian teratas dari bangunan tersebut.

BAB 2

KEPENDUDUKAN

Informasi tentang jumlah penduduk serta komposisi penduduk menurut umur, jenis kelamin, pendidikan, tempat tinggal, pekerjaan dan lain-lain penting diketahui terutama untuk mengembangkan perencanaan pembangunan manusia, baik itu pembangunan ekonomi, sosial, politik, dan lingkungan yang terkait dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Jawa Barat masih merupakan provinsi dengan jumlah penduduk paling besar di Indonesia.

Jumlah penduduk Jawa Barat menurut hasil Sensus Penduduk 2010 sebesar 43.053.732 orang. Penduduk laki-laki sebesar 21.907.040 orang (50,88 persen) dan penduduk perempuan sebesar 21.146.692 orang (49,12 persen). *Sex ratio* tahun 2010 sebesar 103,6. Angka ini menunjukkan rasio antara jumlah penduduk laki-laki dibandingkan dengan perempuan. Maknanya adalah untuk setiap 1.000 perempuan berbanding dengan 1.036 laki-laki.

Peningkatan jumlah penduduk ini disebabkan adanya fertilitas, mortalitas dan migrasi. Fertilitas atau kelahiran merupakan salah satu faktor penambah jumlah penduduk disamping migrasi masuk. Kelahiran bayi membawa konsekuensi pemenuhan kebutuhan tumbuh kembang bayi tersebut, termasuk pemenuhan gizi, kecukupan kalori, dan perawatan kesehatan. Pada gilirannya, bayi ini akan tumbuh menjadi anak usia sekolah yang memerlukan

pendidikan. Selanjutnya anak tersebut akan masuk angkatan kerja dan menuntut pekerjaan. Bayi perempuan akan tumbuh menjadi remaja perempuan dan perempuan usia subur yang akan menikah dan melahirkan bayi.

Tingkat kelahiran di masa lalu mempengaruhi tingginya tingkat fertilitas masa kini. Jumlah kelahiran yang besar di masa lalu disertai dengan penurunan kematian bayi akan menyebabkan bayi-bayi tersebut tetap hidup dalam jumlah yang lebih banyak dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya disaat kematian bayi masih tinggi. Lima belas tahun kemudian bayi-bayi ini akan membentuk kelompok perempuan usia subur. Meskipun tingkat fertilitas sudah menurun, apabila jumlah ibunya besar, sebagai akibat tingkat kelahiran yang tinggi dimasa lalu serta adanya perbaikan kesehatan, maka jumlah bayi yang lahir masih tetap banyak. Pengetahuan tentang fertilitas atau kelahiran dan KB serta indikator-indikatornya sangat berguna bagi para penentu kebijakan dan perencana program untuk merencanakan pembangunan sosial terutama kesejahteraan Ibu dan anak.

Peningkatan jumlah penduduk harus diantisipasi dan ditangani dengan baik oleh OPD terkait dan dilakukan secara berkesinambungan. Hal ini dilakukan agar laju pertumbuhan penduduk tetap terkendali. Adanya 2 instansi yang menangani KB di Jawa Barat yakni BKKBN dan BPPKB diharapkan bisa saling mengisi dan berbagi peran dalam upaya memperlambat laju pertumbuhan penduduk. Usaha peningkatan kualitas sumber daya manusia juga terus diupayakan agar pendidikan wanita semakin tinggi. Dengan

meningkatnya pengetahuan wanita diharapkan sosialisasi pengetahuan akan kesehatan reproduksi semakin mudah dipahami. Harapannya umur kawin pertama penduduk pada perempuan dapat dinaikkan. Dengan meningkatnya usia perkawinan maka umur reproduksinya bisa semakin pendek. Kondisi ini bisa memberi andil berkurangnya kesempatan memperoleh banyak anak sehingga diharapkan dapat terjadi penurunan tingkat kelahiran.

Kabupaten Bogor merupakan kabupaten dengan jumlah penduduk tertinggi di Jawa Barat yaitu sebesar 4,77 juta jiwa atau 11,09 persen penduduk Jawa Barat ada di Kabupaten Bogor. Kabupaten/Kota lainnya dengan jumlah penduduk tertinggi di bawah Kabupaten Bogor adalah Kabupaten Bandung (3,18 juta jiwa atau 7,39 persen), Kabupaten Bekasi (2,63 juta jiwa atau 6,14 persen), Kabupaten Garut (2,40 juta jiwa atau 5,58 persen), dan Kota Bandung (2,39 juta jiwa atau 5,56 persen). Sementara itu 3 (tiga) wilayah yang mempunyai penduduk paling sedikit adalah Kota Banjar (175.157 jiwa atau 0,41 persen), Kota Cirebon (296.140 jiwa atau 0,69 persen) dan Kota Sukabumi (300.068 jiwa atau 0,70 persen).

Kalau melihat tabel 2.1. Kepadatan penduduk di Jawa Barat per Km^2 adalah 1.160 penduduk per Km^2 , sedangkan tingkat kabupaten/kota yang terpadat adalah Kota Bandung, yaitu 14.236 penduduk per Km^2 menyusul di tempat kedua adalah Kota Cimahi yaitu 13.135 penduduk per Km^2 , sedangkan kepadatan penduduk yang paling rendah adalah Kabupaten Sukabumi yaitu 563 penduduk per Km^2 .

Tabel. 2.1. Luas Wilayah, Jumlah Penduduk, Kepadatan Penduduk dan Persentase Total Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2010

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk	Luas Wilayah (Km ²)	Kepadatan Penduduk per Km ²	Persentase Total Penduduk
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Kab. Bogor	4.771.932	2.997,13	1.592	11,09
2	Kab. Sukabumi	2.341.409	4.160,75	563	5,43
3	Kab. Cianjur	2.171.281	3.594,65	604	5,03
4	Kab. Bandung	3.178.543	1.756,65	1.809	7,39
5	Kab. Garut	2.404.121	3.094,40	777	5,58
6	Kab. Tasikmalaya	1.675.675	2.702,85	620	3,89
7	Kab. Ciamis	1.532.504	2.740,76	559	3,55
8	Kab. Kuningan	1.035.589	1.189,60	871	2,41
9	Kab. Cirebon	2.067.196	1.071,05	1.930	4,79
10	Kab. Majalengka	1.166.473	1.343,93	868	2,70
11	Kab. Sumedang	1.093.602	1.560,49	701	2,53
12	Kab. Indramayu	1.663.737	2.092,10	795	3,86
13	Kab. Subang	1.465.157	2.164,48	677	3,39
14	Kab. Purwakarta	852.521	989,89	861	1,98
15	Kab. Karawang	2.127.791	1.914,16	1.112	4,94
16	Kab. Bekasi	2.630.401	1.269,51	2.072	6,14
17	Kab. Bandung Barat	1.510.284	1.278,17	1.182	3,52
18	Kota Bogor	950.334	111,73	8.506	2,21
19	Kota Sukabumi	298.681	48,96	6.101	0,70
20	Kota Bandung	2.394.873	168,23	14.236	5,56
21	Kota Cirebon	296.389	40,16	7.380	0,69
22	Kota Bekasi	2.334.871	213,58	10.932	5,44
23	Kota Depok	1.738.570	199,44	8.717	4,05
24	Kota Cimahi	541.177	41,20	13.135	1,26
25	Kota Tasikmalaya	635.464	184,38	3.446	1,47
26	Kota Banjar	175.157	130,86	1.339	0,41
Jawa Barat		43.053.732	37.116,54	1.160	100,00

Sumber : Sensus Penduduk 2010

Kebijakan kependudukan yang menitikberatkan pada upaya pengendalian jumlah penduduk masih perlu dilanjutkan. Fokus utama mengacu pada upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia. Kebijakan yang tepat akan berdampak positif dalam mengurangi berbagai kendala sosial dan beban masyarakat.

Peningkatan kesejahteraan penduduk adalah fokus yang diharapkan dari kegiatan pembangunan di Jawa Barat. Untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, penduduk diberi kesempatan dan kemudahan untuk dapat memperoleh pekerjaan, bekerja melakukan aktivitas ekonomi, dapat kemudahan untuk berusaha, dan dapat memperoleh penghasilan. Idealnya akses informasi, akses kesehatan, dan akses pendidikan dapat dinikmati dan terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Data tentang kependudukan menjadi hal yang sangat penting mengingat obyek pembangunan itu sendiri adalah penduduk.

Peningkatan sumber daya manusia menuju manusia Jawa Barat yang mandiri dan berkualitas menjadi target utama pembangunan. Selain menjadi target tentu saja dengan tersedianya manusia yang berkualitas, bermoral, dan mau berpikir untuk kemajuan Jawa Barat, maka proses perencanaan program pembangunan dan implementasinya harus yang bersifat lebih mudah dijalankan dan direalisasikan.

2.1. Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur

Informasi penduduk berdasarkan kelompok umur digunakan untuk mengetahui berbagai indikator, terutama indikator kependudukan. Informasi penduduk berdasarkan kelompok umur sangat bermanfaat bagi pemerintah dalam menentukan sasaran dan penerima manfaat kebijakan dari program yang akan digulirkan oleh pemerintah. Sedangkan bagi swasta jumlah penduduk berdasarkan kelompok umur dipergunakan untuk mengetahui segmentasi pasar.

Penduduk berdasarkan kelompok umur bisa digunakan untuk menghitung rasio ketergantungan usia, angkatan kerja, Angka Partisipasi Sekolah, dan lain-lain.

Angka beban ketergantungan (*Dependency Ratio*) atau perbandingan antara penduduk yang belum produktif ataupun yang sudah tidak produktif lagi (usia 0-14 tahun ditambah penduduk usia 65 tahun ke atas) dibagi dengan penduduk usia produktif (usia 15-64 tahun) Jawa Barat tahun 2010 mencapai sebesar 51,22. Artinya bahwa pada tahun 2010, untuk setiap 100 penduduk usia produktif di Jawa Barat menanggung sekitar 51 penduduk usia belum/tidak produktif.

Diantara penduduk yang usianya di bawah 15 tahun ada sebagian penduduk yang terpaksa bekerja membantu ekonomi orang tuanya, dan sebagian penduduk usia di atas 65 tahun masih aktif melakukan kegiatan ekonomi. Oleh karena itu indikator angka ketergantungan bukan merupakan indikator yang sensitif. Naik turunnya angka beban ketergantungan tidak bisa secara langsung

diartikan sebagai naik turunnya tanggungan ekonomi penduduk usia produktif terhadap usia belum/tidak produktif.

Tabel 2.2. Jumlah Penduduk Jawa Barat Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2010

Kelompok Umur	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
0-4	2.119.969	2.004.666	4.124.635
5-9	2.207.317	2.083.318	4.290.635
10-14	2.146.506	2.037.114	4.183.620
15-19	1.965.450	1.884.478	3.849.928
20-24	1.826.776	1.786.560	3.613.336
25-29	1.988.660	1.940.773	3.929.433
30-34	1.850.314	1.808.273	3.658.587
35-39	1.758.987	1.677.663	3.436.650
40-44	1.523.829	1.448.269	2.972.098
45-49	1.266.133	1.211.306	2.477.439
50-54	1.033.134	974.059	2.007.193
55-59	782.426	694.815	1.477.241
60-64	518.274	535.028	1.053.302
65-69	395.450	412.577	808.027
70-74	259.459	306.450	565.909
75+	264.356	341.343	605.699
Jumlah	21.907.040	21.146.692	43.053.732

Sumber: SP2010

2.2. Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

Penduduk Jawa Barat hasil SP2010 berdasarkan jenis kelamin dan kabupaten/kota sebagai berikut:

**Tabel 2.3. Penduduk Jawa Barat Berdasarkan Jenis Kelamin
Tahun 2010**

No.	Kabupaten/Kota	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki + Perempuan	Rasio Jenis Kelamin
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Kab. Bogor	2.452.562	2.319.370	4.771.932	105,74
2	Kab. Sukabumi	1.193.342	1.148.067	2.341.409	103,94
3	Kab. Cianjur	1.123.091	1.048.190	2.171.281	107,15
4	Kab. Bandung	1.620.274	1.558.269	3.178.543	103,98
5	Kab. Garut	1.217.768	1.186.353	2.404.121	102,65
6	Kab. Tasikmalaya	834.996	840.679	1.675.675	99,32
7	Kab. Ciamis	758.889	773.615	1.532.504	98,10
8	Kab. Kuningan	520.632	514.957	1.035.589	101,10
9	Kab. Cirebon	1.059.463	1.007.733	2.067.196	105,13
10	Kab. Majalengka	582.892	583.581	1.166.473	99,88
11	Kab. Sumedang	547.797	545.805	1.093.602	100,36
12	Kab. Indramayu	856.640	807.097	1.663.737	106,14
13	Kab. Subang	739.925	725.232	1.465.157	102,03
14	Kab. Purwakarta	436.082	416.439	852.521	104,72
15	Kab. Karawang	1.096.892	1.030.899	2.127.791	106,40
16	Kab. Bekasi	1.347.223	1.283.178	2.630.401	104,99
17	Kab. Bandung Barat	770.702	739.582	1.510.284	104,21
18	Kota Bogor	484.791	465.543	950.334	104,13
19	Kota Sukabumi	152.080	146.601	298.681	103,74
20	Kota Bandung	1.215.348	1.179.525	2.394.873	103,04
21	Kota Cirebon	148.600	147.789	296.389	100,55
22	Kota Bekasi	1.183.620	1.151.251	2.334.871	102,81
23	Kota Depok	880.816	857.754	1.738.570	102,69
24	Kota Cimahi	274.124	267.053	541.177	102,65
25	Kota Tasikmalaya	321.460	314.004	635.464	102,37
26	Kota Banjar	87.031	88.126	175.157	98,76
Jawa Barat		21.907.040	21.146.692	43.053.732	103,60

Sumber : Sensus Penduduk 2010

Rasio jenis kelamin Jawa Barat berdasarkan data Sensus Penduduk 2010 sebesar 103,6 artinya komposisi laki-laki lebih banyak dibandingkan komposisi perempuan, dengan pengertian ada 103 hingga 104 orang laki-laki di antara 100 orang perempuan.

Melihat tabel 2.3. diatas, rasio jenis kelamin tiga tertinggi di Jawa Barat adalah Kabupaten Cianjur (107,15), Kabupaten Karawang (106,40) dan Kabupaten Indramayu (106,14), sedangkan rasio jenis kelamin tiga terendah berada di Kabupaten Ciamis (98,10), Kota Banjar (98,76) dan Kabupaten Tasikmalaya (99,32).

2.3. Penduduk Berdasarkan Status Perkawinan

Berdasarkan hasil Sensus Penduduk 2010, jumlah penduduk perempuan usia 10 tahun ke atas yang belum kawin sebanyak 11,16 juta atau 32,23 persen, yang pernah kawin sebanyak 23,42 juta orang (67,60 persen).

Dari perempuan yang pernah kawin sebesar 10,50 persen di antara mereka melakukan perceraian, baik cerai hidup maupun cerai mati. Persentase cerai hidup sebesar 3,37 persen sedangkan cerai mati mencapai sebesar 7,13 persen. Penyebab perceraian bisa disebabkan adanya kesulitan ekonomi, maupun faktor lain seperti belum siapnya fisik dan mental akibat perkawinan berlangsung saat usia muda. Perkawinan usia muda berakibat pada panjangnya umur reproduksi sehingga peluang memperoleh anak semakin besar. Dampaknya adalah meningkatnya angka kelahiran.

Tabel 2.4. Jumlah dan Persentase Penduduk 10 tahun ke Atas Menurut Status Perkawinan dan Jenis Kelamin Tahun 2010

Status Perkawinan	Laki-laki	Perempuan	Total
Belum Kawin	6.372.381 (36,25 %)	4.792.401 (28,09 %)	11.164.782 (32,23 %)
Kawin	10.659.144 (60,63 %)	10.296.933 (60,36 %)	20.956.077 (60,50 %)
Cerai Hidup	258.858 (1,47 %)	531.341 (3,11 %)	790.199 (2,28 %)
Cerai Mati	247.021 (1,41 %)	1.422.795 (8,34 %)	1.669.816 (4,82 %)
Tidak Ditanyakan	42.350 (0,24 %)	15.238 (0,09 %)	57.588 (0,17 %)
Total	17.579.754 (100 %)	17.058.708 (100 %)	34.638.462 (100 %)

Sumber: SP2010

BAB 3

PENDIDIKAN

Tersedianya pendidikan yang berkualitas dan pendidikan yang terjangkau oleh lapisan masyarakat pada hakekatnya merupakan tujuan yang ingin dicapai dari program pembangunan bidang pendidikan. Pendidikan merupakan bagian penting dalam pembangunan suatu wilayah dalam upaya memperoleh sumber daya yang tangguh. UUD 1945 pasal 31 mengamanatkan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pengajaran. Demikian juga UU Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) pasal 5 ayat 1 menyebutkan bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Pasal 6 ayat 1 menyebutkan bahwa setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun wajib mengikuti pendidikan dasar (SD/ sederajat dan SMP/ sederajat).

Sumber daya yang berkualitas dapat dicapai melalui pendidikan yang berkualitas. Perlu penanganan yang serius dari unsur pendidikan dan para perencana pembangunan bidang pendidikan. Aspek peningkatan kualitas pendidik, aspek sarana dan prasarana pendidikan yang memadai, aspek pemerataan, dan tidak kalah pentingnya adalah kesadaran masyarakat akan arti penting pendidikan. SDM yang berkualitas siap bersaing di pasar kerja dan berpeluang besar untuk memperoleh pekerjaan. SDM yang tangguh yang mempunyai jiwa kepemimpinan dan kewirausahaan bahkan

berpeluang untuk mengkreasi lapangan pekerjaan yang bisa menyerap tenaga kerja lain. Pada gilirannya penduduk dapat memperoleh penghasilan dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Salah satu program pembangunan bidang pendidikan adalah pendidikan dasar sembilan tahun. Usaha untuk mendukung tercapainya pendidikan dasar sembilan tahun telah dilakukan baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Diantaranya adalah program pendidikan gratis pada tingkat sekolah dasar dan pemberian dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Program ini tampak dirasakan sekali manfaatnya oleh masyarakat khususnya masyarakat di daerah terpencil di pedesaan.

Untuk memudahkan pendidikan lebih mudah diakses oleh masyarakat, lebih dekat ke masyarakat memerlukan dukungan anggaran pendidikan yang memadai baik dari APBN maupun APBD. Komitmen pemerintah untuk mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar 20 persen perlu diapresiasi. Hal ini dapat mendorong percepatan realisasi penyediaan sarana dan prasarana pendidikan. Sarana dan prasarana yang rusak atau membahayakan bisa segera direnovasi. Sarana dan prasarana yang belum ada dan mendesak untuk diadakan, untuk mendekatkan pendidikan pada masyarakat, bisa segera diadakan. Cita-cita luhurnya adalah setiap masyarakat dapat mengenyam pendidikan yang murah dan berkualitas yang pembiayaannya ditanggung oleh pemerintah. Setiap program pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat perlu didukung, perlu diawasi agar pelaksanaannya

mencapai hasil yang diinginkan. Pemanfaatan alokasi anggaran pendidikan harus benar-benar dioptimalkan untuk sebesar-besar kemakmuran dan kemajuan rakyat.

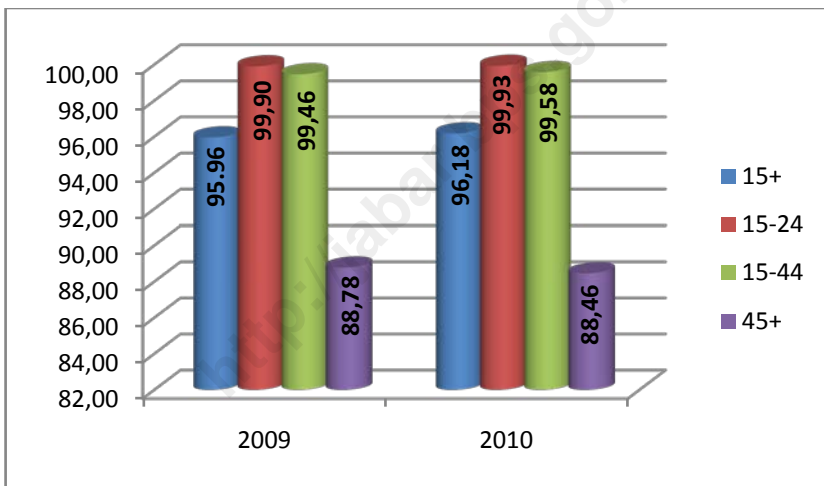
3.1. Angka Melek Huruf (AMH)

Dari hasil Susenas 2010 dapat diperoleh gambaran pembangunan pendidikan di Jawa Barat dilihat dari besarnya capaian angka melek huruf (AMH). Persentase penduduk 15 tahun ke atas yang melek huruf di Jawa Barat mencapai sekitar 95,96 persen pada tahun 2009, dan meningkat menjadi 96,18 persen di tahun 2010. Kelompok penduduk yang buta huruf juga menjadi fokus pembangunan bidang pendidikan. Dari tahun ke tahun upaya penurunan kelompok yang buta huruf senantiasa diupayakan. Diantaranya melalui pelayanan dan peningkatan kualitas pendidikan non formal dengan indikator kinerja meningkatnya warga belajar dan kelompok belajar keaksaraan. Angka Buta Huruf menggambarkan presentase pada kelompok penduduk usia 15 tahun ke atas yang tidak dapat membaca dan menulis.

Beberapa kendala dalam upaya pembangunan pendidikan antara lain kurangnya tenaga pendidik di daerah. Disinyalir untuk tingkat SD masih ada satu guru menangani beberapa kelas. Kesejahteraan guru yang masih rendah khususnya guru non PNS sedikit demi sedikit harus mulai ditingkatkan agar mereka bisa fokus dalam mengabdikan menyampaikan ilmu pengetahuan. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen menuntut guru memiliki

keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu tertentu yang diperoleh dari pendidikan profesi. Konsekuensi logis dari profesionalisme, UU tersebut telah menetapkan bahwa guru berhak memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimal dan jaminan kesehatan sosial. Undang-undang itu baru mencakup para guru yang PNS. Dengan demikian masih ada pekerjaan rumah untuk meningkatkan kesejahteraan guru Non PNS.

Gambar 3.1. Angka Melek Huruf Jawa Barat tahun 2010



Sumber: Susenas 2010

**Tabel 3.1. Penduduk Usia Sekolah, dan Angka Buta Huruf
di Jawa Barat Tahun 2010**

Indikator	2009	2010
A. Penduduk Usia Sekolah		
1. 7 – 12 tahun	5.135.429	5.288.612
2. 13 – 15 tahun	2.498.299	2.556.079
3. 16 – 18 tahun	2.279.322	2.264.437
B. Angka Buta Huruf (%)		
1. Total	4,04	3,82
2. Laki-laki	2,27	2,24
3. Perempuan	5,81	5,40

Sumber: Susenas 2009 dan 2010

Kemampuan membaca dan menulis membantu kemudahan berkomunikasi. Dengan kemampuannya penduduk lebih mudah dalam menyerap maupun menyampaikan informasi. Ketidakmampuan membaca dan menulis menghambat masuknya pengetahuan. Ini akan berdampak pada keterbelakangan dan ujungnya adalah kemiskinan. Lilitan kemiskinan menjadi kendala kelompok masyarakat ini dalam mengakses pendidikan. Terselenggaranya program keaksaraan fungsional dengan fokus

penduduk yang benar-benar belum bisa membaca dan menulis membuka kesempatan penduduk pada kelompok ini untuk bisa membaca dan menulis.

Data Susenas 2010 memperlihatkan bahwa angka buta huruf di Jawa Barat mengalami penurunan dibandingkan dengan kondisi pada tahun 2009. Pada tahun 2009 penduduk 15 tahun ke atas yang buta huruf sebesar 4,04 persen. Pada tahun 2010 berkurang menjadi 3,82 persen. Bila hanya melihat indikator ini, kondisi ini dapat mencerminkan adanya keberhasilan program pembangunan bidang pendidikan di Jawa Barat. Perempuan masih lebih tinggi dari pada angka buta huruf laki-laki. Secara umum hal ini dipengaruhi oleh tingkat pendidikan laki-laki lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat pendidikan perempuan.

3.2. Angka Partisipasi Sekolah (APS)

Angka Partisipasi Sekolah (APS) merupakan indikator yang menunjukkan partisipasi sekolah penduduk yang bersekolah. Angka Partisipasi Sekolah (APS) cenderung menurun sejalan dengan naiknya jenjang pendidikan. APS untuk jenjang SLTP lebih rendah dibanding pada jenjang SD, dan semakin rendah pada jenjang pendidikan lanjutan atas dan pendidikan tinggi. Berarti ada sebagian lulusan SD yang tidak melanjutkan ke SMP, sebagian lulusan SLTP tidak mendaftar ke SLTA. Dengan kata lain ada jenjang sekolah yang terputus dikalangan masyarakat, khususnya penduduk usia sekolah.

Hasil Susenas 2010 menginformasikan bahwa APS penduduk usia 7 – 12 tahun sebesar 98,29 persen. Pada tahun 2009 mencapai 98,22 persen. Artinya pada Tahun 2010 dari seluruh penduduk usia 7 – 12 tahun, yang masih bersekolah sebesar 98,29 persen, sedangkan sebesar 1,71 persen ada yang tidak/belum bersekolah dan yang sudah tidak bersekolah lagi.

APS penduduk kelompok umur 13-15 tahun pada tahun 2010 mencapai 82,73 persen, sedangkan tahun 2009 pada kelompok umur yang sama mencapai 81,82 persen. Artinya APS penduduk kelompok umur 13-15 tahun mengalami kenaikan sebesar 0,07 persen. APS kelompok penduduk usia 16 – 18 tahun pada tahun 2010 mencapai 47,82 persen naik sebesar 0,88 persen dibanding kondisi pada tahun 2009. Secara umum untuk semua jenjang pendidikan, APS di Jawa Barat mengalami peningkatan dibanding keadaan pada tahun 2009. Semakin tinggi level pendidikan, persentase penduduk yang bersekolah cenderung menurun karena penduduk masih berfokus untuk menamatkan pendidikan dasar.

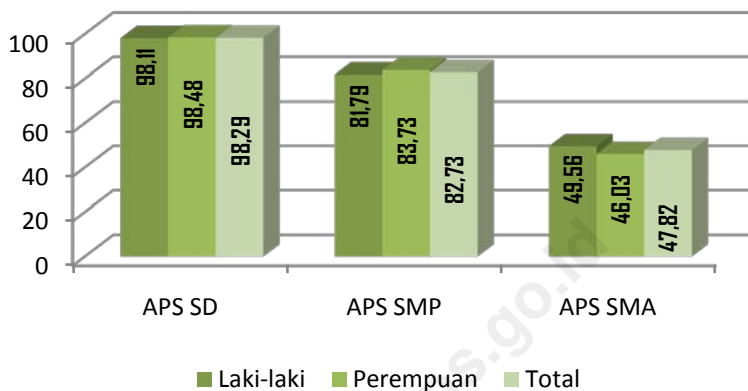
APS laki-laki usia kelompok umur 7-12 tahun (98,11 persen) dan 13-15 tahun (81,79 persen) lebih kecil jika dibandingkan APS perempuan pada kelompok umur yang sama secara berturut-turut 7-12 tahun (98,48 persen) dan 13-15 tahun (83,73 persen). Melihat angka tersebut cukup menggembirakan karena fenomena kalau anak perempuan cukup sampai Sekolah Dasar telah beralih ke Sekolah Menengah Pertama. Sedangkan APS tahun 2010 pada kelompok umur 16-18 tahun masih didominasi anak laki-laki (49,56 persen), namun kalau kita lihat kenaikan APS perempuan kelompok umur 16-

18 tahun dari tahun 2009 ke tahun 2010 cukup besar kenaikannya yaitu sebesar 1,06 persen. Keadaan tersebut tercermin pada gambar 3.2.

Kondisi tersebut bisa disebabkan antara lain karena ketiadaan sarana dan prasarana sekolah di wilayah mereka sehingga enggan menyekolahkan anaknya ke tempat yang jauh dari tempat tinggalnya. Kemiskinan juga menjadi faktor penyebab lainnya. Masih ada yang berpola pikir bahwa pendidikan belum tentu dapat menjamin perbaikan taraf hidupnya. Pendidikan belum tentu menjamin seseorang bisa bekerja atau tidak. Sosialisasi pentingnya pendidikan perlu terus disebarluaskan. Walaupun kemiskinan mendera, anak-anak mereka harus tetap diberi kesempatan bersekolah.

Untuk semua jenjang pendidikan, persentase penduduk yang tamat SD, SMP, SMU/SMK, dan Perguruan Tinggi pada tahun 2010 lebih tinggi dibandingkan dengan kondisi pada tahun 2009. Lulusan Sekolah Dasar naik sebesar 2,76 persen, lulusan Sekolah Menengah Pertama sebesar 0,84 persen, lulusan Sekolah Menengah Atas 2,31 persen, dan Perguruan Tinggi naik sebesar 0,69 persen. Kondisi ini diikuti dengan menurunnya persentase penduduk yang tidak mempunyai ijazah SD (5,37 persen). Dengan meningkatnya tingkat pendidikan penduduk berarti meningkatnya kualitas SDM. Hal ini akan berkontribusi pada kenaikan angka IPM Jawa Barat

Gambar 3.2. Angka Partisipasi Sekolah (APS) Menurut Jenjang Pendidikan dan Jenis Kelamin di Provinsi Jawa Barat Tahun 2010



Sumber : Susenas 2010

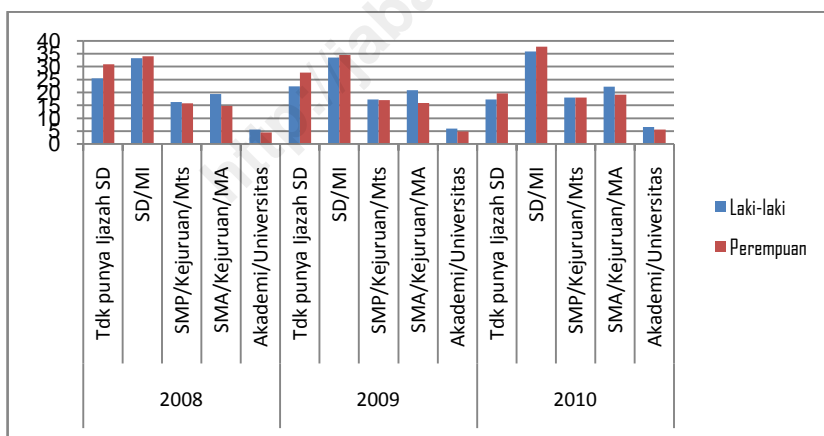
3.3. Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan

Pada tahun 2010, persentase penduduk usia 10 tahun ke atas di Jawa Barat yang memiliki ijazah SD sebesar 36,80 persen. Sedangkan persentase penduduk yang memiliki ijazah tertinggi SMP sederajat sebesar 17,98 persen, yang memiliki ijazah SMU/SMK sebesar 20,69 persen; dan sebesar 6,09 persen yang memiliki ijazah perguruan tinggi (Akademi/Perguruan Tinggi). Sebagai ilustrasi, dari setiap 1.000 orang penduduk 10 tahun ke atas di Jawa Barat, 60 orang di antaranya berkesempatan menyelesaikan pendidikan

tingginya di berbagai level pendidikan antara lain Diploma I/II/III, Sarjana, hingga program Master dan Doktor.

Peningkatan persentase penduduk Jawa Barat yang mampu menyelesaikan SMU/K ke atas perlu terus ditingkatkan melalui berbagai program. Kebijakan Bantuan Operasional Sekolah, program BOS buku, Program Khusus Bantuan Murid (BKM), program Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOMM), program bea siswa, program peningkatan kualifikasi, kompetensi, dan sertifikasi, serta realisasi pembangunan sarana dan prasarana penunjang pendidikan perlu terus dijaga kesinambungannya. Pendidikan jangan sampai menjadi barang yang mahal yang tidak terjangkau oleh masyarakat.

Gambar 3.3. Persentase Penduduk Usia 10 Tahun Keatas Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan dan Jenis Kelamin di Jawa Barat, Tahun 2008-2010



Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional tahun 2008-2010

BAB 4

KESEHATAN

Tujuan pembangunan kesehatan khususnya yang terkait dengan kesehatan balita adalah menurunkan angka kematian bayi dan menurunkan angka kematian ibu melahirkan. AKB merupakan indikator sensitif yang berkaitan dengan ketersediaan, pemanfaatan, dan kualitas pelayanan kesehatan, terutama pelayanan anak. Terkait pula dengan pendapatan keluarga, jumlah anggota rumah tangga, pendidikan ibu, dan kecukupan gizi. Berbagai program dilaksanakan oleh pemerintah untuk mewujudkan tujuan tersebut antara lain program Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), Bidan di Desa (BDD), dan Pekan Imunisasi Nasional (PIN).

Kesehatan balita selain dipengaruhi oleh kesehatan ibu, juga dipengaruhi oleh faktor lain diantaranya adalah penolong kelahiran. Data penolong kelahiran bayi dapat dijadikan salah satu indikator kesehatan terutama dalam hubungannya dengan tingkat kesehatan ibu dan anak serta pelayanan kesehatan secara umum. Dilihat dari kesehatan ibu dan anak, persalinan yang ditolong oleh tenaga medis (dokter, bidan, tenaga medis lain) dianggap lebih baik dibandingkan dengan persalinan yang ditolong oleh dukun, famili/lainnya.

Secara umum persentase kelahiran balita yang ditolong oleh tenaga medis pada tahun 2010 meningkat dibandingkan dengan pada tahun 2009. Sebaliknya persentase penolong kelahiran oleh dukun dan tenaga lainnya di luar tenaga medis mengalami

penurunan. Kondisi ini sangat menggembirakan. Perlu terus disosialisasikan pentingnya melahirkan di tempat pelayanan kesehatan agar kesadaran ibu hamil mau melahirkan di fasilitas kesehatan dengan penolong kelahiran dokter atau bidan/tenaga medis lain meningkat. Perlu didukung juga dengan ketersediaan tenaga pelayanan kesehatan, sarana, dan prasarana kesehatan.

Penanganan proses persalinan sampai dengan pasca persalinan yang berkualitas dan tepat waktu diharapkan akan mengurangi resiko kematian bayi dan ibu. Dukun yang membantu proses persalinan tidak dikategorikan dalam tenaga kesehatan lain walaupun pelatihan bagi dukun beranak juga digalakkan oleh OPD terkait. Persentase penolong kelahiran balita oleh dokter meningkat dari 13,22 persen pada tahun 2009 menjadi 15,24 persen pada tahun 2010. Penolong kelahiran oleh bidan/tenaga medis sebesar 57,39 persen, naik 2,09 persen dibanding kondisi tahun 2009. Persalinan oleh dukun menurun dari 31,30 persen menjadi 27,15 persen pada tahun 2010.

Pemberian Air Susu Ibu (ASI) dalam waktu yang cukup pada balita dapat meningkatkan daya tahan tubuh terhadap infeksi dan penyakit lainnya mengingat ASI merupakan mikronutrein penting bagi balita. ASI juga merupakan salah satu faktor penting untuk perkembangan anak dan merupakan zat yang sempurna untuk pertumbuhan bayi serta mempercepat perkembangan berat badan. Lamanya balita diberi ASI yang terbaik adalah sampai usia 24 bulan. Sejak lahir sampai usia enam bulan sebaiknya bayi hanya diberi ASI saja. Setelah enam bulan bayi mulai dapat diberikan makanan

tambahan pendamping ASI sampai usia 2 tahun. Setelah usia tersebut balita sudah siap disapih.

**Tabel 4.1. Lama Balita Menyusui, Persentase
Penolong Kelahiran Terakhir dan Pemberian Imunisasi
Menurut Jenis Kelamin
di Jawa Barat Tahun 2009 dan 2010**

Indikator	Tahun	
	2009	2010
A. Balita		
1. Jumlah Balita	3.817.303	4.016.381
2. Balita yang Disusui	3.623.701	3.822.872
3. % disusui > 24 bulan	34,12	33,69
4. % disusui 12-23 bulan	39,80	39,78
5. % disusui < 12 bulan	26,08	26,53
B. % Penolong Kelahiran (terakhir)		
1. Dokter	13,22	15,24
2. Bidan/Tenaga Medis Lain	55,30	57,39
3. Dukun	31,30	27,15
4. Lainnya	0,18	0,22
C. Imunisasi		
1. Balita yang Diberi Imunisasi	93,76	94,98
2. DPT	91,11	92,31
3. Polio	91,99	92,31
4. Campak/Morbili	79,31	78,82
5. Hepatitis B	87,01	85,92

Sumber: Susenas 2009 dan 2010

Persentase balita yang diberi ASI meningkat 0,25 persen menjadi 95,18 persen pada tahun 2010 atau sebanyak 3,82 juta balita dari 4,02 juta balita di Jawa Barat pernah diberi ASI. Namun kalau dilihat persentase balita yang disusui oleh ibunya selama 2 tahun atau lebih dan antara 12 bulan sampai dengan 23 bulan

mengalami penurunan dari tahun 2009 ke tahun 2010. Dan sedikit peningkatan balita yang disusui kurang dari satu tahun (0,45 persen).

Suatu fenomena yang cukup menyedihkan bila balita semakin lama semakin tidak mendapatkan ASI. Apakah para ibu jaman sekarang sudah tidak mau lagi menyusui anak-anaknya. Apakah ibu jaman sekarang lebih repot memberikan ASI-nya dibandingkan dengan memberikan susu formula. Ataukah para ibu jaman sekarang sudah banyak yang bekerja sehingga tidak ada waktu untuk memberikan ASI pada anaknya. Ataukah susu formula jaman sekarang sudah murah harganya. Pertanyaan-pertanyaan tersebut harus dijawab oleh pemerintah, agar pemerintah bisa menggalakkan pemberian ASI bagi bayi, dimana ASI lebih berkualitas, lebih murah, lebih memberikan kekebalan pada anak-anaknya dan lebih efisien dan steril.

Imunisasi merupakan salah satu cara yang dilakukan dalam pencegahan penyakit. Beberapa jenis imunisasi yang wajib diberikan pada balita antara lain adalah BCG, Polio, DPT, dan Campak. Secara umum persentase balita yang pernah mendapat imunisasi cukup tinggi yaitu di atas 95,18 persen untuk semua jenis imunisasi. Persentase balita mendapat imunisasi tahun 2010 lebih kecil dibanding kondisi pada tahun 2009 untuk semua jenis imunisasi. Dari tabel 2.3. diatas, terlihat adanya penurunan pemberian Imunisasi terhadap balita dimana penurunan imunisasi campak/morbili sebesar 0,49 persen dan penurunan sebesar 1,09 persen pada imunisasi Hepatitis B. Hal ini sebagai bahan evaluasi pemerintah di bidang

BAB 5

KETENAGAKERJAAN

Sumber daya manusia yang produktif merupakan modal bagi pembangunan, namun sebaliknya kalau penduduk kebanyakan tidak produktif menjadikan beban bagi pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan ketenagakerjaan dan akibat yang ditimbulkan oleh masalah dari orang yang tidak bekerja/pengangguran.

Tabel 5.1. Persentase Penduduk Usia 15 tahun Ke atas Menurut Jenis Kegiatan di Jawa Barat Tahun 2009 dan 2010

Jenis Kegiatan	Tahun	
	2009	2010
Angkatan Kerja **)	62.89	62.38
Bekerja *)	89,04	89,67
Pengangguran Terbuka *)	10,96	10,33
Jumlah	100.00	100.00
Bukan Angkatan Kerja **)	37.11	37.62
Sekolah *)	21.07	22.13
Mengurus Rumah tangga *)	64.00	63.10
Lainnya *)	14.93	14.78
Jumlah	100.00	100.00
Penduduk usia 15 thn keatas	100.00	100.00

Sumber : BPS, Data Sakernas 2009 dan 2010

Keterangan :

*) persentase dari angkatan kerja dan bukan angkatan kerja

**) persentase dari penduduk usia kerja

Dari tabel 5.1. diatas tergambar bahwa penduduk 15 tahun keatas yang bekerja mengalami kenaikan dari tahun 2009 ke 2010 sebesar 0,63 persen. Dengan adanya kenaikan penduduk yang bekerja, maka secara otomatis terjadi penurunan angka pengangguran pada tahun 2010.

Tabel 5.2. Persentase Penduduk Usia 15 tahun Ke atas Menurut Lapangan Pekerjaan Utama di Jawa Barat Tahun 2009 dan 2010

Lapangan Pekerjaan Utama *)	Tahun	
	2009	2010
1	25.18	23.40
2	18.18	20.00
3	25.46	24.83
4	14.54	15.68
5	16.69	16.08
Total	100.00	100.00

Sumber : BPS, Data Sakernas 2009 dan 2010

Keterangan *) :

1. Pertanian, Kehutanan, Perburuan, dan Perikanan
2. Industri Pengolahan
3. Perdagangan Besar, Eceran, Rumah Makan, dan Hotel
4. Jasa Kemasyarakatan
5. Lainnya (Pertambangan dan Penggalian, Listrik, Gas dan Air, Bangunan, Angkutan, Pergudangan, dan Komunikasi, Keuangan, Asuransi, Usaha Persewaan Bangunan, Tanah dan Jasa Perusahaan

Persentase penduduk Angkatan kerja mengalami penurunan sebesar 0,51 persen, maka akan ada kenaikan pada persentase penduduk Bukan Angkatan Kerja. Dimana salah satu dari indikator bukan angkatan kerja yang mengalami kenaikan yaitu pada kegiatan sekolah, naik sebesar 1,06 persen. Artinya pada tahun 2010

penduduk mengerti kalau pendidikan sudah menjadi hal yang diperlukan bagi penduduk usia 15 tahun daripada bekerja dahulu.

Kalau melihat tabel diatas, terlihat adanya pergeseran penduduk dalam memilih lapangan pekerjaan. Ada yang naik ada pula yang menurun, yang mengalami kenaikan terjadi pada bidang industri pengolahan dan jasa kemasyarakatan, sedangkan yang mengalami penurunan yaitu pada bidang pertanian, perdagangan dan lainnya (bidang Pertambangan dan Penggalian, Listrik, Gas dan Air, Bangunan, Angkutan, Pergudangan, dan Komunikasi, Keuangan, Asuransi, Usaha Persewaan Bangunan, Tanah dan Jasa Perusahaan. Bidang Pertanian dari tahun 2009 ke tahun 2010 mengalami menurun hingga 1,78 persen. Hal ini dimungkinkan terjadi karena semakin sempitnya lahan pertanian yang tersedia berganti menjadi perumahan-perumahan atau pabrik. Bidang Perdagangan mengalami penurunan sebesar 0,63 persen, sedangkan Bidang Lainnya yang mencakup bidang Pertambangan dan Penggalian, Listrik, Gas dan Air, Bangunan, Angkutan, Pergudangan, dan Komunikasi, Keuangan, Asuransi, Usaha Persewaan Bangunan, Tanah dan Jasa Perusahaan turun sebesar 0,61 persen.

Kenaikan yang cukup signifikan terjadi pada Bidang Industri Pengolahan yaitu sebesar 1,82 persen. Menyusul kenaikan pada Bidang Jasa Kemasyarakatan (1,14 persen).

Tabel 5.3. menyajikan tentang Penduduk Usia 15 tahun ke atas menurut Status Pekerjaan Utama, dimana Status Pekerjaan Utama ini terbagi menjadi 7 status pekerjaan. Dilihat dari tabel tersebut, tahun 2009 dan tahun 2010 penduduknya yang berstatus

pekerjaan utama terbanyak di Jawa Barat adalah buruh 31,99 persen pada tahun 2009 dan naik menjadi 34,40 persen pada tahun 2010. Urutan kedua status berusaha sendiri, meskipun kenaikannya dari tahun 2009 ke tahun 2010 hanya 0,12 persen. Yang cukup menarik untuk di perhatikan dari tabel tersebut, dimana ada penurunan pada status pekerjaan Pekerja Bebas di Non Pertanian, sedangkan ada peningkatan pada status pekerjaan Pekerja Tak Dibayar.

Tabel 5.3. Persentase Penduduk Usia 15 tahun Ke atas Menurut Status Pekerjaan Utama di Jawa Barat Tahun 2009 dan 2010

Status Pekerjaan Utama *)	Tahun	
	2009	2010
1	23.05	23.17
2	16.94	16.12
3	3.08	2.93
4	31.99	34.40
5	7.56	7.77
6	8.14	6.58
7	9.24	16.08
Total	100.00	100.00

Sumber : BPS, Data Sakernas 2009 dan 2010

Keterangan *) :

1. Berusaha Sendiri
2. Berusaha Dibantu Buruh Tidak Tetap/Buruh Tidak Dibayar
3. Berusaha Dibantu Buruh Tetap/Buruh Dibayar
4. Buruh/Karyawan/Pegawai
5. Pekerja Bebas Di Pertanian
6. Pekerja Bebas Di Non Pertanian
7. Pekerja Tak Dibayar

BAB 6

PERUMAHAN

Tersedianya tempat tinggal/rumah merupakan kebutuhan dasar setiap manusia. Menurut Azwar (1996) dan Mukono (2000) rumah berfungsi sebagai tempat untuk melepaskan lelah, tempat bergaul dan membina rasa kekeluargaan diantara anggota keluarga, tempat berlindung dan menyimpan barang berharga, dan rumah juga merupakan status lambang sosial. Rumah yang layak huni harus memenuhi standar kesehatan agar penghuni rumah tersebut dapat terjamin kesehatannya.

Dalam Susenas 2010 dikumpulkan berbagai indikator perumahan, seperti status kepemilikan rumah tinggal, jenis atap, dinding, dan lantai rumah tinggal, luas lantai, dan fasilitas-fasilitas rumah tangga lainnya, seperti sumber air minum, tempat buang air besar, dan lain-lain. Dengan dikumpulkannya data-data diatas diharapkan kondisi dan situasi perumahan di Jawa Barat dapat diketahui dengan baik.

Tabel 6.1. menggambarkan kondisi perumahan yang dilihat dari 5 indikator perumahan yaitu persentase status kepemilikan rumah, rumah dengan jenis atap terluas, rumah dengan jenis dinding terluas, jenis lantai terluas dan persentase menurut luas lantai per kapita. Bila dilihat dari tabel tersebut maka secara umum kondisi perumahan di Jawa Barat adalah banyak rumah dengan status milik sendiri (75,67%), atap terluas rumah berjenis genteng (90,89%),

dengan dinding terluas berjenis tembok (79,52%), lantai terluasnya bukan tanah (90,93%) dan dengan luas lantai per kapitanya 8 – 20 m² (55,98%).

Tabel 6.1.
Persentase Rumah Tangga Menurut Beberapa Indikator Perumahan
Menurut Tipe Daerah di Provinsi Jawa Barat Tahun 2010

Rincian Indikator	Tipe Daerah		Total
	Perkotaan	Pedesaan	
(1)	(2)	(3)	(4)
1 Status Kepemilikan Rumah			
Milik sendiri	67.95	89.51	75.67
Kontrak	10.74	0.97	7.24
Sewa	6.26	0.51	4.20
Lainnya	15.05	9.01	12.89
2 Jenis Atap Terluas			
Beton	2.97	1.26	2.36
Genteng	87.16	97.58	90.89
Lainnya	9.87	1.16	6.75
3 Jenis Dinding Terluas			
Tembok	89.03	62.46	79.52
Lainnya	10.97	37.54	20.48
4 Jenis Lantai Terluas			
Bkn tanah/bambu	93.93	85.56	90.93
Tanah/Bambu	6.07	14.44	9.07
5 Luas Lantai Per Kapita			
< 8 m ²	18.46	12.33	16.27
8 - 20 m ²	53.50	60.41	55.98
> 20 m ²	28.03	27.26	27.76

Sumber : Susenas 2010

Tabel 6.2
Persentase Rumah Tangga Menurut Beberapa Indikator Perumahan
Menurut Tipe Daerah di Provinsi Jawa Barat Tahun 2010

Rincian Indikator	Tipe Daerah		Total
	Perkotaan	Pedesaan	
(1)	(2)	(3)	(4)
1 Sumber air minum			
- Air kemasan bermerk/isi ulang	32.33	8.37	23.75
- Ledeng meteran/eceran	11.61	3.80	8.81
- Sumur bor/pompa	23.21	17.43	21.14
- Sumur/Mata Air Terlindung	27.58	49.60	35.46
- Lainnya	5.27	20.79	10.83
2 Jarak Ke Tempat Penampungan Kotoran/Tinja			
- < 10 m	36.77	24.63	31.15
- >= 10 m	44.21	48.39	46.14
- Tidak tahu	19.02	26.98	22.70
3 Cara memperoleh air minum			
- membeli	45.99	16.14	35.30
- Tidak membeli	54.01	83.86	64.70
4 Fasilitas tempat buang air besar			
- Sendiri	74.56	53.22	66.92
- Bersama	14.32	13.40	13.99
- Umum	3.94	9.38	5.89
- Tidak ada	7.18	24.00	13.21
5 Jenis Kloset			
- Leher angsa	86.38	67.61	80.50
- Plengsengan	8.84	11.59	9.70
- cemplung/cubluk	3.23	11.03	5.68
- Tidak pakai	1.54	9.76	4.12
6 Tempat pembuangan akhir tinja			
- Tangki/SPAL	70.16	44.05	60.81
- Kolam/Sawah	6.23	23.45	12.39
- Lainnya	23.62	32.50	26.80
7 Sumber penerangan			
- Listrik PLN	98.33	96.06	97.52
- Listrik non PLN	1.17	2.06	1.49
- Lainnya	0.50	1.87	0.99
8 Daya Listrik terpasang (watt)			
- 450	39.00	58.35	45.82
- 900 - 2.200	48.74	18.03	37.91
- > 2.200	0.72	0.01	0.47
- Tanpa meteran	11.54	23.60	15.79

Sambungan Tabel 6.2.

9	Bahan bakar/energi utama untuk memasak			
	- Listrik	2.33	0.92	1.83
	- Gas elpiji	77.92	42.92	65.39
	- Minyak tanah	3.66	0.94	2.69
	- Kayu bakar	13.51	54.56	28.21
	- Lainnya	2.58	0.66	1.89

Sumber : Susenas 2010

Bila dibandingkan antara perkotaan dan pedesaan maka untuk rumah dengan status milik sendiri dan atap terluasnya genteng lebih banyak di pedesaan daripada di perkotaan. Sebaliknya untuk rumah dengan dinding terluasnya tembok dan jenis lantai terluas bukan tanah/bambu lebih banyak di perkotaan.

Selanjutnya pada tabel 6.2. diuraikan beberapa indikator perumahan yang berhubungan dengan fasilitas yang terdapat pada rumah tangga menurut tipe daerah di Jawa Barat. Sumber air minum yang banyak digunakan oleh rumah tangga adalah sumur/mata air terlindung (35,46%), air kemasan bermerk/isi ulang (23,75%) dan sumur bor/pompa (21,14%). Sumber air minum yang digunakan oleh masyarakat terlihat perbedaannya bila dilihat menurut tipe daerah. Di perkotaan, sumber air minum yang banyak digunakan adalah air kemasan bermerk/isi ulang (32,33%) sedangkan di pedesaan banyak menggunakan sumur/mata air terlindung (49,60%). Hal ini mungkin karena keterbatasan sumber air bersih di perkotaan sehingga untuk air minum menggunakan air kemasan bermerk/isi ulang, sedangkan

air yang berasal dari sumber lainnya hanya digunakan untuk mandi dan mencuci.

Jarak sumber air minum ke tempat penampungan kotoran/tinja juga sangat berpengaruh pada kesehatan keluarga. Dari tabel tersebut juga terlihat bahwa secara umum rumah tangga dengan jarak sumber air minum ke tempat penampungan kotoran/tinja sudah lebih dari 10 m² (46,14%). Tetapi terdapat 22,70 persen rumah tangga yang tidak mengetahui jarak sumber air minum ke tempat penampungan kotoran/tinja atau bahkan tidak mengetahui dimana tempat penampungan kotoran/tinja terdekat sehingga tidak bisa memperkirakan jaraknya.

Dalam memperoleh air minum, sebanyak 35,30 persen rumah tangga di Jawa Barat mendapatkannya dengan membeli dan sisanya mendapatkan dengan gratis. Di perkotaan, rumah tangga yang membeli air untuk minum cukup banyak yaitu sebesar 45,99 persen, sedangkan di pedesaan hanya sekitar 16,14 persen.

Untuk fasilitas tempat buang air besar, secara umum rumah tangga di Jawa Barat telah mempunyai fasilitas sendiri (66,92%), dengan jenis kloset yang paling banyak digunakan adalah leher angsa (80,50%), dan tempat pembuangan akhir tinja ke tanki/SPAL (60,81%). Rumah tangga yang tidak mempunyai fasilitas tempat buang air besar masih cukup banyak yaitu sekitar 13,21 persen dan rumah tangga yang tempat pembuangan akhir tinjanya ke tempat lainnya (lobang tanah, sungai, pantai, laut, dll) juga masih cukup banyak yaitu 26,80 persen, dengan rincian 23,62 persen rumah tangga di perkotaan dan 32,50 persen rumah tangga di pedesaan.

Tentunya hal ini harus menjadi perhatian instansi terkait untuk membantu menyediakan fasilitas tersebut.

Sumber penerangan yang memadai (listrik) dapat meningkatkan kenyamanan di dalam rumah. Selain itu, anggota rumah tangga juga dapat lebih mengembangkan dirinya, karena dengan adanya sumber penerangan anggota keluarga dapat mendapatkan berbagai informasi melalui televisi, radio bahkan dari internet. Pada tahun 2010, sebanyak 99,01 persen rumah tangga di Jawa Barat telah menikmati listrik, sedangkan sisanya sebanyak 0,99 persen belum menikmati listrik. Dari yang telah menikmati listrik tersebut, 45,82 persennya menggunakan daya sebesar 450 watt, 37,91 persen menggunakan daya 900 – 2.200 watt, 0,47 persen menggunakan daya lebih dari 2.200 watt dan sisanya sebanyak 15,79 persen tidak memakai meteran. Rumah tangga yang tidak memakai meteran ini kemungkinan adalah rumah tangga-rumah tangga yang memakai listrik secara bersama-sama tetapi hanya menggunakan satu meteran atau bisa juga rumah tangga yang mencantol dari tetangganya.

Untuk bahan bakar/energi utama untuk memasak, rumah tangga di Jawa Barat banyak menggunakan gas elpiji. Hal ini dilihat dari tingginya persentase rumah tangga yang menggunakannya yaitu sebesar 65,39 persen. Tingginya persentase gas elpiji mungkin dikarenakan masyarakat sudah beralih dari menggunakan minyak tanah. Selain lebih awet dalam pemakaian, gas elpiji juga relatif lebih murah dibandingkan dengan minyak tanah. Selain itu persentase rumah tangga yang menggunakan kayu bakar untuk memasak masih

cukup banyak yaitu sekitar 28,21 persen dan yang menggunakan bahan lainnya (arang, briket, dll) sebanyak 1,88 persen.

Persentase rumah tangga yang menggunakan kayu bakar dan bahan lainnya (bahan bakar padat) merupakan salah satu indikator MDGs. Indikator ini digunakan untuk mengetahui polusi dalam ruangan dan pengurangan sumber daya hutan karena pemakaian bahan bakar padat untuk memasak. Bila dibandingkan antara perkotaan dan pedesaan terlihat bahwa di perkotaan bahan bakar/energi utama yang digunakan untuk memasak adalah gas elpiji (77,92%) sedangkan di pedesaan adalah kayu bakar (54,56%).

BAB 7

PENGELUARAN RUMAHTANGGA

Tingkat kesejahteraan rumah tangga dapat diukur dari besarnya pendapatan yang diterima oleh rumah tangga. Namun dalam kenyataannya data pendapatan rumah tangga sangat sulit diperoleh sehingga sering didekati oleh pengeluaran untuk konsumsi rumah tangga. Pengeluaran untuk konsumsi rumah tangga dibedakan menjadi dua, yaitu pengeluaran untuk konsumsi makanan dan pengeluaran untuk konsumsi bukan makanan.

BPS setiap tahun mengumpulkan data pengeluaran rumah tangga melalui Susenas. Pada tahun 2010 susenas dilaksanakan sebanyak dua kali. Yang pertama dilaksanakan pada bulan Maret 2010 atau yang lebih dikenal dengan Susenas Panel dan yang kedua dilaksanakan pada bulan Juli 2010. Sampel yang digunakan untuk susenas Maret lebih sedikit daripada sampel yang digunakan pada bulan Juli, sehingga data yang dihasilkan hanya cukup untuk menggambarkan keadaan sosial ekonomi provinsi. Untuk data level kabupaten/kota digunakan data hasil Susenas Juli karena jumlah sampelnya memungkinkan untuk estimasi sampai level tersebut. Pada tulisan ini akan digunakan data pengeluaran rumah tangga hasil Susenas Juli 2010.

Tabel 7.1. memperlihatkan persentase penduduk menurut kabupaten/kota dan golongan pengeluaran per kapita sebulan di Jawa Barat tahun 2010. Pada tabel tersebut, modus rata-rata

pengeluaran penduduk sebulan adalah pada golongan pengeluaran antara Rp 300.000,- - Rp 499.999,- dengan persentase sebesar 35,24 persen. Bila dibandingkan antara modus rata-rata pengeluaran provinsi dengan modus rata-rata pengeluaran kabupaten/kota terlihat beberapa perbedaan. Kabupaten Bekasi, Kota Bandung, Kota Bekasi dan Kota Depok memiliki modus rata-rata pengeluaran di atas provinsi yaitu antara Rp 500.000,- - Rp 749.999,-. Sementara itu Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Garut, Kabupaten Tasikmalaya dan Kabupaten Kuningan modus rata-rata pengeluarannya berada di bawah provinsi yaitu terletak antara Rp 200.000,- Rp 299.999,-.

Rata-rata pengeluaran menurut tipe daerah (tabel 7.2.) menunjukkan rata-rata pengeluaran per kapita di daerah perkotaan lebih besar daripada perkotaan yaitu masing-masing sebesar Rp 174.263,- berbanding Rp 106.831,-. Sementara itu rata-rata pengeluaran per kapita untuk Jawa Barat sebesar Rp 151.138,- dengan rincian Rp 78.241,- atau sekitar 51,77 persen untuk konsumsi makanan dan Rp 72.897,- atau 48,23 persen untuk konsumsi bukan makanan. Bila dibandingkan menurut tipe daerah maka terlihat di daerah pedesaan rata-rata pengeluaran untuk konsumsi makanan lebih tinggi daripada konsumsi bukan makanan sedangkan di daerah perkotaan terjadi sebaliknya. Hal ini menandakan bahwa tingkat kesejahteraan penduduk perkotaan lebih tinggi daripada di pedesaan.

Tabel 7.1.
Persentase Penduduk Menurut Golongan Per Kapita Sebulan
di Provinsi Jawa Barat Tahun 2010

Kabupaten/Kota	Golongan Pengeluaran Per Kapita Sebulan								Total
	< 100.000	100.000 - 149.999	150.000 - 199.999	200.000 - 299.999	300.000 - 499.999	500.000 - 749.000	750.000 - 999.999	1 juta +	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Kab Bogor	-	1.79	5.78	17.60	32.62	22.02	9.75	10.45	100
Kab Sukabumi	0.17	2.36	13.55	41.23	33.38	6.02	2.12	1.18	100
Kab Cianjur	-	1.26	11.78	42.35	32.86	7.41	1.95	2.39	100
Kab Bandung	-	0.82	4.98	26.78	40.33	16.56	6.08	4.45	100
Kab Garut	-	4.20	17.49	39.00	27.33	8.11	2.15	1.70	100
Kab Tasikmalaya	0.19	2.71	14.91	39.01	32.45	7.11	2.51	1.11	100
Kab Clamis	-	1.62	7.22	30.51	44.99	11.66	2.34	1.66	100
Kab Kuningan	-	1.85	12.83	42.16	33.40	7.60	1.31	0.85	100
Kab Cirebon	-	0.91	6.91	31.98	42.81	9.15	3.97	4.26	100
Kab Majalengka	-	0.88	3.25	20.29	44.41	21.16	6.57	3.43	100
Kab Sumedang	0.19	0.52	5.72	23.43	41.94	20.56	4.54	3.09	100
Kab Indramayu	-	0.52	2.14	27.52	48.42	15.65	3.53	2.21	100
Kab Subang	-	0.53	6.76	27.25	46.48	15.09	2.84	1.04	100
Kab Purwakarta	-	1.42	4.93	22.64	40.19	18.90	6.84	5.08	100
Kab Karawang	-	1.12	2.72	16.25	40.92	25.69	7.91	5.39	100
Kab Bekasi	-	-	1.12	8.09	29.96	31.16	16.29	13.38	100
Kab Bandung Barat	-	1.53	9.30	24.19	39.57	16.31	5.33	3.77	100
Kota Bogor	-	0.31	1.57	11.80	33.33	27.32	11.53	14.13	100
Kota Sukabumi	-	0.88	1.53	9.53	40.41	24.53	11.53	11.59	100
Kota Bandung	-	0.19	1.22	6.07	25.50	29.25	13.10	24.66	100
Kota Cirebon	-	0.58	3.84	16.60	36.23	20.27	10.77	11.71	100
Kota Bekasi	-	0.23	0.73	3.15	25.96	35.84	17.27	16.81	100
Kota Depok	-	-	0.22	2.12	24.57	29.13	17.92	26.04	100
Kota Cimahi	-	0.47	0.95	9.36	33.55	32.79	12.71	10.16	100
Kota Tasikmalaya	0.09	0.92	6.41	20.63	35.29	20.53	8.50	7.63	100
Kota Banjar	-	1.16	8.45	30.16	36.98	12.93	5.02	5.30	100
Total	0.02	1.21	6.29	22.93	35.24	18.91	7.62	7.78	100

Sumber : Susenas 2010

Tabel 7.2.

**Rata-rata Pengeluaran Per Kapita Menurut Tipe Daerah dan
Jenis Konsumsi di Jawa Barat Tahun 2010**

Tipe Daerah	Konsumsi makanan		konsumsi non makanan		Total
(1)	(2)		(3)		(4)
Perkotaan	84,958	(48.75)	89,305	(51.25)	174,263
Pedesaan	65,371	(61.19)	41,460	(38.81)	106,831
Total	78,241	(51.77)	72,897	(48.23)	151,138

Sumber : Susenas 2010

Untuk lebih detailnya, pada tabel 7.3. diperlihatkan distribusi rata-rata pengeluaran per kapita menurut kelompok barang dan golongan pengeluaran per kapita. Rata-rata pengeluaran untuk konsumsi makanan di setiap golongan pengeluaran lebih tinggi daripada rata-rata pengeluaran untuk konsumsi bukan makanan kecuali pada golongan pengeluaran 1 juta atau lebih, pengeluaran untuk konsumsi bukan makanan lebih tinggi daripada pengeluaran untuk konsumsi makanan. Selain itu bila diperhatikan rincian-rincian di kelompok makanan terlihat pada golongan pengeluaran < Rp 100.000,- sampai dengan Rp 200.000,- - Rp 299.999,-, pengeluaran untuk padi-padian lebih tinggi daripada pengeluaran untuk rincian makanan lainnya, sedangkan pada golongan pengeluaran Rp 300.000,- ke atas pengeluaran untuk makanan dan minuman jadi lebih tinggi daripada pengeluaran untuk konsumsi makanan lainnya.

Tabel 7.3.
Distribusi Pengeluaran Per Kapita Sebulan Menurut Kelompok Barang dan Golongan Per Kapita Sebulan
di Provinsi Jawa Barat Tahun 2010

Kelompok Barang	Golongan Pengeluaran Per Kapita Sebulan								Total
	< 100.000	100.000 - 149.999	150.000 - 199.999	200.000 - 299.999	300.000 - 499.999	500.000 - 749.000	750.000 - 999.999	1 juta +	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Padi-padian	35.24	29.90	25.78	19.99	13.37	8.27	5.77	2.73	8.91
Umbi-umbian	1.10	0.64	0.63	0.53	0.39	0.30	0.24	0.15	0.29
Ikan/Cumi/Kerang	3.65	4.38	4.26	4.03	3.71	3.24	2.65	1.56	2.86
Daging	-	0.49	0.80	1.36	2.05	2.60	2.63	1.95	2.13
Telur dan susu	0.70	2.49	2.65	3.06	3.35	3.87	3.98	3.01	3.41
Sayur-sayuran	3.04	3.67	3.56	3.44	3.33	2.96	2.54	1.32	2.56
Kacang-kacangan	1.70	2.59	2.69	2.65	2.34	1.82	1.37	0.68	1.64
Buah-buahan	-	0.65	0.99	1.18	1.42	1.73	1.92	1.77	1.63
Minyak dan lemak	2.24	3.13	2.94	2.66	2.20	1.71	1.42	0.70	1.60
Bahan minuman	0.99	2.23	2.10	2.23	2.14	1.85	1.65	1.01	1.68
Bumbu-bumbuan	1.16	1.78	1.89	1.76	1.55	1.20	0.90	0.43	1.08
Konsumsi lainnya	3.64	1.88	2.37	2.40	2.33	2.04	1.71	1.18	1.85
Makanan/minuman jadi non alkohol	4.42	6.42	7.91	11.00	13.46	15.62	17.13	17.57	15.32
Minuman beralkohol	-	-	0.02	0.02	0.02	0.03	0.02	0.07	0.04
Tembakau dan sirih	1.64	6.29	7.60	8.47	8.67	7.35	6.62	4.29	6.77
Konsumsi makanan	59.52	66.54	66.18	64.78	60.32	54.58	50.54	38.44	51.77
Perumahan dan fasilitas rumah tangga	23.19	18.19	18.08	18.68	21.15	23.50	25.12	28.71	24.16
Aneka barang dan jasa	5.79	5.61	5.74	6.52	7.91	9.69	10.60	12.31	9.80
Biaya kesehatan	0.89	1.33	1.45	1.70	2.01	2.24	2.83	3.90	2.69
Biaya Pendidikan	5.32	3.65	3.48	2.97	2.72	3.06	3.27	5.38	3.69
Pakaian, alas kaki dan tutup kepala	4.68	3.58	3.92	3.72	3.41	3.16	2.99	2.71	3.13
Barang tahan lama	0.31	0.34	0.49	0.78	1.23	1.89	2.34	4.43	2.42
Pajak, pungutan dan asuransi	0.30	0.34	0.47	0.60	0.84	1.26	1.63	2.74	1.57
Keperluan pesta dan upacara/kenduri	-	0.42	0.19	0.24	0.41	0.62	0.68	1.38	0.76
konsumsi non makanan	40.48	33.46	33.82	35.22	39.68	45.42	49.46	61.56	48.23
Total Konsumsi	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

Sumber: Susenas 2010

Hal ini menandakan pola konsumsi makanan mengalami perubahan seiring dengan meningkatnya pengeluaran rumah tangga.

<http://jabar.bps.go.id>

BAB 8

ASPEK SOSIAL EKONOMI LAINNYA

8.1. Pemanfaatan Teknologi Informasi

Pada saat ini perkembangan teknologi informasi sudah sedemikian pesatnya. Bila ditengok sepuluh tahun ke belakang, komputer hanya banyak terlihat di kantor, tempat penyewaan komputer, sekolah, kampus dan lain-lain. Tetapi sekarang bukan hanya komputer PC yang terlihat tetapi masyarakat sudah banyak yang membawa-bawa laptop untuk beraktifitas. Begitu pula dengan *hand phone* (HP), yang pada saat ini sudah begitu populer di tengah masyarakat, yang tidak hanya digunakan untuk menelepon atau mengirim sms, tetapi juga digunakan untuk mengakses internet.

Masyarakat sekarang sudah sedemikian tergantungnya dengan berbagai peralatan informasi tersebut karena dalam aktifitas sehari-hari, baik itu sekolah atau bekerja, serasa sangat mudah dan cepat dengan bantuan peralatan-peralatan tersebut. Dalam pendataan Susenas 2010, dikumpulkan data-data mengenai pemanfaatan teknologi informasi, seperti kepemilikan telepon atau HP dan akses internet.

Tabel 8.1.
Persentase Rumah Tangga Menurut Penguasaan
Telepon Rumah dan *Hand Phone* (HP)
di Jawa Barat Tahun 2010

Klasifikasi Daerah	Telepon Rumah	HP
(1)	(2)	(3)
- Perkotaan	16.69	80.99
- Pedesaan	2.60	57.14
- Total	11.64	72.45

Sumber : Susenas 2010

Pada tahun 2010, persentase rumah tangga yang menguasai telepon rumah lebih kecil daripada HP, yaitu masing-masing sebesar 11,64 persen berbanding 72,45 persen. Lebih tingginya penguasaan HP daripada telepon rumah mungkin disebabkan karena HP lebih mudah penggunaannya, tidak perlu memasang jaringan telepon, dan harganya relatif murah di pasaran. Bila dibandingkan menurut tipe daerah penguasaan telepon rumah di perkotaan mencapai 16,69 persen, lebih tinggi daripada di pedesaan yang hanya 2,6 persen. Begitu pula dengan penguasaan HP, rumah tangga di perkotaan lebih banyak yang menguasai HP daripada di pedesaan. Yang menarik adalah lebih dari setengah rumah tangga di pedesaan telah memiliki HP yang berarti wabah teknologi informasi bukan hanya merambah perkotaan tetapi telah sampai di pedesaan.

Tabel 8.2.
Persentase Rumah Tangga Menurut Penguasaan Komputer
di Jawa Barat Tahun 2010

Tipe Daerah	PC/desktop	Notebook/Laptop
(1)	(2)	(3)
- Perkotaan	13.36	9.00
- Pedesaan	2.16	1.12
- Total	9.35	6.18

Sumber : Susenas 2010

Tabel selanjutnya menggambarkan persentase rumah tangga menurut penguasaan komputer, dalam hal ini dibedakan menjadi dua jenis yaitu PC/desktop dan Notebook/laptop. Secara umum, persentase penguasaan komputer oleh rumah tangga di Jawa Barat masih sangat kecil yaitu hanya sekitar 9,35 persen rumah tangga yang menguasai PC/desktop dan 6,18 persen rumah tangga yang menguasai Notebook/laptop. Bila dirinci menurut tipe daerah, rumah tangga di perkotaan lebih tinggi persentasenya, baik dalam penguasaan PC/desktop atau Notebook/laptop, dibandingkan dengan pedesaan.

Selain penguasaan alat-alat informasi diatas, dalam susenas juga dikumpulkan data tentang akses internet yang dilakukan oleh penduduk usia 10 tahun ke atas. Pada saat ini untuk mengakses internet bisa dilakukan dimana saja dan dengan media yang lebih beragam, bukan hanya menggunakan komputer tetapi juga bisa

menggunakan HP. Kemunculan media-media sosial seperti *Facebook* atau *twitter* di dunia maya membuat seseorang lebih sering mengakses internet. Tabel 8.3. berikut berisi tentang persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang pernah mengakses internet selama 3 bulan yang lalu.

HP merupakan media yang paling banyak digunakan untuk mengakses internet (55,03%). Selain mudah dibawa karena bentuknya yang mungil juga karena banyaknya paket-paket internet murah yang ditawarkan oleh provider telepon seluler sehingga dengan biaya yang sedikit sudah bisa mengakses internet. Selanjutnya, media akses yang juga digunakan adalah warnet (44,54%). Tingginya persentase media warnet untuk mengakses internet mungkin salah satunya disebabkan oleh menjamurnya warnet-warnet yang menyediakan permainan game online. Selain itu warnet juga biasanya menetapkan tarif per jamnya tidak terlalu mahal sehingga terjangkau oleh masyarakat.

Penggunaan HP di masa-masa mendatang mungkin saja akan semakin menenggelamkan pemakaian telepon rumah. Karena dengan menggunakan HP tidak perlu membayar tagihan telepon setiap bulannya dan pemakaian pulsa bisa lebih dikontrol. Selain itu kebutuhan internet juga akan semakin meningkat seiring dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat akan akses data dan informasi

Tabel 8.3.
Persentase Penduduk 10 Tahun Ke Atas Menurut
Penggunaan Internet di Jawa Barat Tahun 2010

Lokasi/ Media Akses	Persentase
(1)	(4)
a. Rumah	25.30
b. Warnet	44.54
c. Kantor	20.72
d. Sekolah	13.30
e. HP	55.03
f. Lainnya	6.00

Sumber : Susenas 2010

8.2. Pelayanan Kesehatan, Beras Miskin dan Jaminan Sosial

Upaya pemerintah dalam pengentasan kemiskinan adalah dengan melakukan berbagai macam program yang ditujukan untuk rumah tangga miskin. Diantara program-program tersebut adalah dengan menerbitkan suatu kartu yang dapat digunakan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan gratis dan pembagian beras miskin (raskin) untuk rumah tangga miskin. Dalam susenas 2010 terdapat beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan program-program pengentasan kemiskinan, diantaranya tentang pelayanan kesehatan gratis dengan periode referensi selama 6 bulan yang lalu,

pembagian raskin, jaminan pembiayaan/asuransi kesehatan, dan lain-lain.

Tabel 8.4.
Persentase Rumah Tangga Yang Mendapat Pelayanan Kesehatan Gratis
Selama 6 Bulan Yang Lalu
dan Jenis Kartu Yang Digunakan di Provinsi Jawa Barat Tahun 2010

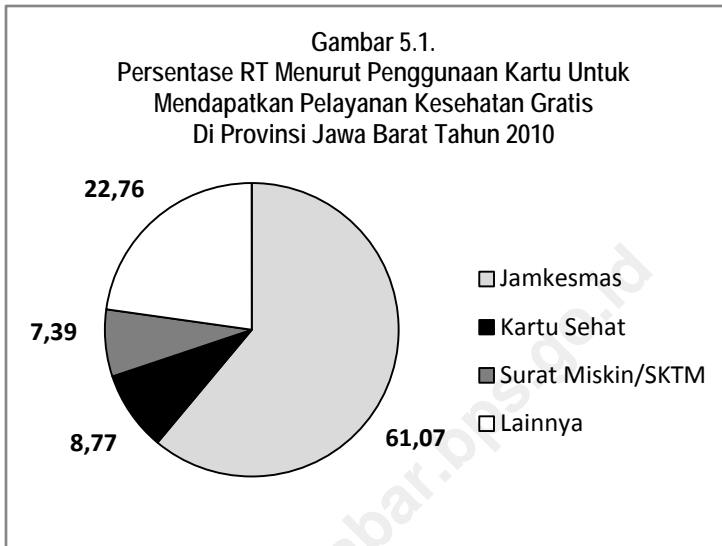
Tipe Daerah	Pernah Mendapat Pelayanan Kesehatan Gratis	Jenis Kartu/Surat Yang Digunakan				Total
		Jamkesmas	Kartu Sehat	Surat Miskin/SKTM	Lainnya	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Perkotaan	15.23	56.53	8.57	7.42	27.47	100.00
Pedesaan	16.51	68.58	9.10	7.34	14.97	100.00
Total	15.69	61.07	8.77	7.39	22.76	100.00

Sumber: Susenas 2010

Pada tabel 2.15 terlihat bahwa belum semua rumah tangga yang mendapatkan pelayanan kesehatan gratis dari pemerintah. Tercatat hanya sekitar 15,69 persen rumah tangga di Jawa Barat yang telah mendapatkan pelayanan kesehatan gratis. Rumah tangga di pedesaan (16,51%) lebih banyak yang menikmati program ini dibandingkan rumah tangga di perkotaan (15,23%).

Rumah tangga yang mendapatkan pelayanan kesehatan gratis paling banyak menggunakan Jamkesmas (61,07%), kartu/surat lainnya (22,76%), kartu sehat (8,77%) dan surat miskin/SKTM (7,39%). Rumah tangga, baik di pedesaan maupun di perkotaan, paling banyak menggunakan Jamkesmas untuk mendapatkan

pelayanan kesehatan gratis, yaitu masing-masing sebesar 68,58 persen dan 56,53 persen.



Program pemerintah yang ditujukan untuk rumah tangga miskin adalah pembagian beras miskin (raskin). Untuk Jawa Barat, terdapat sekitar 52,24 persen rumah tangga yang mendapat/membeli raskin selama 6 bulan terakhir dengan persentase tertinggi terdapat di pedesaan yaitu sebesar 70,78 persen rumah tangga, sedangkan di perkotaan hanya sekitar 40,89 persen rumah tangga.

Tabel 8.5.
Persentase Rumah Tangga Yang Mendapat/Membeli Raskin
Selama 3 Bulan Yang Lalu
di Provinsi Jawa Barat Tahun 2010

Tipe Daerah	Pernah Mendapat/ Membeli Beras Miskin	Berapa Kg Raskin Pada Pembelian Terakhir	Berapa Rupiah per Kg Yang Dibayarkan pada Pembelian Terakhir
(1)	(2)	(3)	(4)
Perkotaan	41.89	5.49	2257
Pedesaan	70.78	6.09	2249
Total	52.24	5.78	2254

Sumber : Susenas 2010

Rumah tangga yang mendapat/membeli raskin tersebut rata-rata mendapat 5,78 kg per rumah tangga dengan rata-rata harga per kilogramnya sebesar Rp 2.254,-. Rumah tangga di perkotaan rata-rata mendapat raskin sebanyak 5,49 kg dengan harga Rp 2.257,- /kg sedangkan rumah tangga di pedesaan mendapat raskin sebanyak 6,09 kg dengan harga Rp 2.249,-/kg.

Selanjutnya, pada tabel 9.6 memperlihatkan ketersediaan jaminan pembiayaan/asuransi kesehatan bagi rumah tangga untuk keperluan pengobatan.

Tabel 8.6.
Persentase Rumah Tangga Yang Mempunyai Jaminan Pembiayaan/Asuransi Kesehatan
Untuk Keperluan Berobat Jalan/Rawat Inap
di Provinsi Jawa Barat Tahun 2010

Jenis Jaminan Pembiayaan/Asuransi Kesehatan	Tipe Daerah		
	Perkotaan	Pedesaan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)
JPK PNS/Veteran/Pensiun	9.43	3.51	7.31
JPK Jamsostek	15.14	3.07	10.82
Asuransi Kesehatan Swasta	4.29	0.74	2
Tunjangan/Penggantian biaya oleh perusahaan	6.11	0.81	3.02
JPK MM/Kartu Sehat/JPK Gakin/Kartu			4.21
Miskin/Jamkesmas	15.79	25.84	19.3
Dana Sehat/JPKM/JPK Lain	1.08	0.74	9
			0.96

Sumber : Susenas 2010

Pada tahun 2010, sekitar 19,39 persen rumah tangga di Jawa Barat menggunakan JPK MM/Kartu sehat/JPK Gakin/Kartu Miskin/Jamkesmas dan bila dirinci menurut tipe daerah maka di perkotaan sebanyak 15,79 persen rumah tangga dan di pedesaan 25,84 persen. Persentase ini merupakan yang tertinggi diantara jenis jaminan pembiayaan/asuransi kesehatan lainnya. Jenis Pembiayaan lainnya yang termasuk tinggi penggunaannya adalah JPK Jamsostek (1,82%) dan JPK PNS/Veteran/Pensiun (7,31%), sedangkan Dana Sehat/JPKM/JPK lain adalah jenis pembiayaan yang paling kecil penggunaannya, hanya sekitar 0,96 persen rumah tangga.



Badan pusat statistik Provinsi Jawa Barat

Jl. P.H. Hasan Mustafa No.43 telp. (022) 7272595-701696

Fax (022)7213572 Bandung 40124 E-mail bps3200@mailhost.bps.go.id

Home Page <http://jabar.go.id>